BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum *United State Agency For Internasional Development* (USAID)

Amerika adalah sebuah Republik Federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik federal. Ekonomi Amerika Serikat menjadi yang terbesar di dunia semenjak tahun 1870-an. Kemenangan pada Perang Spanyol-Amerika dan Perang Dunia I mengangkat Amerika Serikat sebagai salah satu kekuatan militer dunia. Pada Perang Dunia II, Amerika Serikat menjadi negara pertama yang memiliki senjata nuklir. Berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet membuat Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara adidaya dunia dan menjadi yang terdepan dalam hal militer, ekonomi, budaya, dan politik.

Secara global Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang memberikan bantuan asing terbesar dari segi jumlah total dollar sekitar 13,3 milyar dolar/ 0,15 persen dari GNP Amerika Serikat menurut laporan pada tahun 2003. Bantuan luar negeri sebagai salah satu instrumen kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Kestabilan negara-negara berkermbang menjadi cukup krusial bagi sebuah investor seperti negara-negara Amerika Serikat. Oleh sebab itu *United State Agency For Internasional Development* **(**USAID) merupakan salah satu instrumen ekonomi dan sosial pemerintahan Amerika Serikat dalam mengembangkan menjaga kestabilan dan kemakmuran Negara berkembang seperti Indonesia.

United State Agency For Internasional Development (USAID) Sebuah lembaga pemerintahan federal Amerika Serikat yang bersifat independen, yang diresmikan oleh John F.Kennedy sebagai bagian dari undang-undang tentang bantuan luar negeri tahun 1961. USAID merupakan organisasi bantuan luar negeri Amerika Serikat dimana USAID tersebut menjadi perhatian yang mendasar, untuk membantu negara yang mengalaim krisis ekonomi yang berkepanjangan serta membantu dalam bidang pembangunan social di negara tersebut.
(http://www.usaid.gov/about_usaid/)

Markas besar USAID adalah di Washington D.C dan juga memiliki kantor perwkilan di tiap-tiap negara yang memang melakukan kerjasama dengan USAID. USAID dikepalai oleh seorang Administator dan Deputi Administator, keduanya diangkat oleh presiden dan selanjutnya dikonfirmasi kembali oleh Senat. Administator dan Direktur bantuan luar negeri Amerika Serikat saat ini dijabat oleh Henretta H. Fore dan yang menjadi Deputi Administator James Kunder,

Pembentukan USAID mengalami perjalanan yang sangat panjang, sejarah berdirinya USAID tidak terlepas dari sejarah bantuan luar negeri Amerika Serikat itu sendiri sebagai bagian yang terpenting dari kebiasaan luar negeri Amerika Serikat. Sejarah bantuan luar negeri Amerika Serikat dimulai ketika dunia II berakhir, yang dahulu digunakan untuk merekonstruksi ekonomi Eropa Barat dan untuk mencegah ekspansi Soviet pasca perang dunia II.
(http://www.usaid.gov/about_usaid/usaidorg.html)

Selama perang dunia II pandangan Amerika Serikat terhadap bantuan luar negeri sebagai instrument kebijkan luar negeri berubah drastis Sejak tahun 1961

USAID telah menjadi badan utama Amerika Serikat dalam menyediakan bantuan kepada negara-negarayang sedang dalam pemulihan bencana yang berusaha lepas dari kemiskinan maupun yang sedang melakukan reformasi demokratis.

Lembaga ini memberikan bantuan kemanusiaan berupa bahan makanan dan barang-barang lain. Termasuk bantuan bagi korban becana alam. Lembaga ini juga memberikan bantuan untuk program pemelihraan kesehatan, seperti vaksinasi, imunisasi, perlindungan dari aids, gizi untuk ibu dan anak dan pelayanan program keluarga berencana.

USAID juga mempromosikan pertumbuhan ekonomi dengan mengunakan kemampuan dan sumber daya yang ada di tingkat lokal. USAID mendukung pembangunan yang bersifat lingkungan, dan pecegahan timbulnya berbagai masalah sebagai akibat dari polusi udara, penebangan hutan, pemasaran global, polusi air tanah, dan pembuangan limbah kelaut. Saat ini USAID juga memperluas bidang kerjanya dengan membiayai sejumlah program untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil dan pengembangan kehidupan demokrasi.

Wilayah kerja USAID mencangkup negara-negara di Afrika, Asia, Eropa Timur dan Eropa Tengah, Amerika Latin dan Karabian, Timur Tengah dan negara-negara yang pernah bergabung dengan Uni Soviet. Lembaga ini berkerjsama dengan individu-individu, pemerintahan dan organisasi lainya dan membantu pembangunan di sejumlah bidang.

Di Indonesia USAID memberikan dukungan untuk berbagai program yang sesuai dengan misi dan tujuan lembaga ini. Yaitu perbaikan dibidang ekonomi

dan transisi menuju demokrasi. Dalam jangka pendek, program-program USAID diharapkan dapat mempengaruhi dampak krisis ekonomi yang dialami masyarakat.

(http://www.usaid.gov/pubs/cbj2003/ane/id/)

Dalam beberapa tahun terakhir, USAID terlibat dalam upaya perbaikan aktifitas krisis ekonomi dan politik Indonesia. Program-program yang dijalankan antara lain adalah program transisi menuju demokrasi, perbaikan ekonomi dan sistem financial, perusahaan lapangan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, jaminan pangan untuk kelompok masyarakat tertentu.

Dalam program transisi menuju demokrasi, USAID antara lain telah membantu dalam bidang pendidikan pemilih serta penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan umum. Dibidang keuangan, membantu usaha restrukturisasi perbangkan, pengembangan perangkat ekonomi makro yang baru, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan ekonomi. Di bidang lingungan hidup, membantu LSM dan pemerintahan daerah untuk mengelola sumberdaya secara berkelanjutan.

(http://www.USAID.gov/about_USAID/) (16 April 2010)

Dalam menyalurkan bantuan luar negeri Amerika Serikat, USAID bekerjasama dengan organisasi-organisasi sukarela swasta, organisasi adat, universitas bisnis Amerika Serikat, lembaga Internasional, pemerintah lainnya, dan badan-badan pemerintah Amerika Serikat lainnya. USAID membagi bantuannya menjadi beberapa bidang diantaranya :

1. Pertanian

   Petani adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi dan untuk mengelola lingkungan hidup.

2. Demokrasi pemerintahan

   Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan)

3. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan

   Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu Negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya.

4. Lingkungan

   Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut.

5. Pendidikan dan pelatihan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat sedangkan Pelatihan adalah proses melatih kegiatan atau pekerjaan

6. Kesehatan global

   Isu kesehatan pada saat ini bukan hanya menjadi isu dalam negeri, tetapi sudah menjadi masalah global. Diperlukan peran serta dan perhatian bukan hanya dalam satu Negara, melainkan dari berbagai Negara, organisasi-organisasi, Lembaga-lembaga dan LSM terkait.

7. Global kemitraan

   Kemitraan biasanya didefnisikan sebagai hubungan sukarela dan bersifat kerjasama antara beberapa pihak, baik pemerintah maupun swasta yang semua orang didalamnya setuju untuk bekerjsama dalam meraih tujuan bersama dan menunaikan kewajiban tertentu serta menanggung resiko, tanggung jawab, sumberdaya, kemampuan dan keuntungan secara bersama-sama. Kerjasama global diharapkan mampu mengatasi setiap isu permasalahan yang di hadapi oleh negara-negara, lembaga-lembaga.

8. Bantuan kemanusiaan

   Bantuan kemanusiaan bukan hanya bentuk bantuan dana saja tetapi bisa berupa bantuan teknis, barang dan jasa dan lain-lain. USAID sendiri

bekerjasama dengan pemerintah-pemerintah untuk mengakolasikan bantuan-bantuan kemanusiaan tersebut.

(http://www.usaid.gov/our_work/) (16 April 2010)

Amerika Serikat sebagai salah satu negara maju di dunia, memiliki tanggung jawab faktanya Amerika Serikat memiliki sejarah yang cukup panjang dalam memberikan bantuan luar negerinya kepada negara-negara berkembang. Amerika Serikat memiliki sembilan prinsip dasar dalam menuntun program bantuan pembangunan dan rekonstruksi miliknya, prinsip-prinsip terebut menjadi dasar kesuksesan program bantuan luar negeri sebagai salah satu instrumen kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Amerika Serikat, dimana kesuksesan dari program bantuan luar negeri tersebut adalah untuk mencapai tujuan pembangunan termasuk didalamnya pertumbuhan ekonomi , sosial dan budaya. Adapun Kesembilan prinsip Amerika Serikat ialah:

1. *Ownership,* dibangun berdasarkan pada kepemimpinan, partisipasi, dan komitmen dari Negara kepada rakyat.
2. *Capacity-building*, memperkuat institusi-institusi lokal, mentransfer kemanapun teknis dan mempromosikan kebijakan yang tepat.
3. *Sustainability*, merancang program untuk menjamin efek atau hasil dari program tersebut berlangsung lama.
4. *Selectivity* mengalokasikan sumber daya berdasarkan pada kebutuhan komitmen lokal dan kepentingan kebijakan luar negeri.
5. *Assessment,* melakukan suatu riset memadai mengadaptasi metode-metode terbaik dan dirancang untuk kondisi setempat.

6. *Results*, memfokuskan sumber daya alam untuk mencapai tujuan yang jelas terfokus.
7. *Partnership* berkoloborasi dengan pemerintah, komonitas, donor, NGOs, sektor swasta.
8. *Flexibility* beradaptasi pada kondisi yang berubah-rubah mengambil kesempatan yang ada memaksimalkan ekistensi.
9. *Accountability* merancang transparasi kedalam sistem dan membuat *checks* dan *balances* yang efektif untuk mencegah korupsi

(http://www.usaid.gov/faqs.html) (16 April 2010)

3.1.1 Misi dan Tujuan USAID

Misi dan tujuan lembaga ini. Yaitu perbaikan dibidang ekonomi dan transisi menuju demokrasi. Dalam jangka pendek, program-program USAID diharapkan dapat mempengaruhi dampak krisis ekonomi yang dialami masyarakat. Misi USAID di Indonesia dikepalai oleh Direktur Misi (*Mission Director*) dan Wakil Direktur Misi (*Deputy Mission Director*).

Di Indonesia, USAID jug member dukungan untuk berbagai program yang sesuai dengan misi dan tujuan lembaga ini, yaitu upaya perbaikan dibidang ekonomi dan transisi menuju demokrasi. Dalam bidang transisi menuju demokrasi, USAID antara lain membantu dalam bidang pendidikan. Di bidang keuangan, membantu usaha restrukturisasi perbangkan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan ekonomi. Di bidang

lingkungan hidup, membantu LSM dan pemerintahan daerah untuk mengelola sumberdaya secara berkelanjutan, dan sector swasta dalam konservasi alam.

Dalam mendukung proses desentralisasi daerah di Indonesia, program-program USAID antara lain mendukung perbaikan jasa pelayanan lokal dan perencanaan *budgeting* pada sektor-sektor penanganan dan pengolahan sumber daya alam dan kesehatan. Untuk mengurangi ancaman konflik dan krisis di Indonesia yang terkait dengan kekerasan etnis dan agama, USAID menyediakan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi dan korban bencana alam.

Aktivitas USAID juga memprioritaskan sektor kesehatan seperti ketahanan hidup anak, keluarga berencana dan HIV/AIDS. Dalam mengimplemetasikan hal ini USAID bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, Badan Badan Donor lainnya, dan Organisasi Indonesia dan Organisasi Internasional lainnya.

Tujuan dari USAID adalah memberi dukungan untuk berbagai program yang sesuai dengan misi dan tujuan lembaga ini, yaitu upaya perbaikan di bidang ekonomi dan transisi menuju demokrasi. Dalam jangka pendek, program-program USAID diharapkan dapat mengurangi dampak krisis ekonomi yang yang dialami masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir ini, USAID terlibat dalam upaya perbaikan akibat krisis ekonomi dan politik di Indonesia.

Program-program yang dijalankan antara lain adalah program transisi menuju demokrasi, perbaikan ekonomi dan sistem finansial, perluasan lapangan kerja, pengelolaan lingkungan hidup serta jaminan pangan untuk kelompok masyarakat tertentu. Dalam program transisi menuju demokrasi, USAID antara

lain telah membantu dalam bidang pendidikan pemilih serta penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan umum.

Di bidang keuangan, membantu usaha restrukturisasi perbankan, pengembangan perangkat ekonomi makro yang baru, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan ekonomi. Di bidang lingkungan hidup, membantu LSM dan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan, di samping usaha melibatkan sektor swasta dalam konservasi alam. Sementara dalam masalah kesehatan, telah membantu pengadaan makanan tambahan bagi anak, obat-obatan, pelatihan untuk bidan di desa, serta pendidikan untuk pencegahan penyakit kelamin.

Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, sejak tahun 1980-an Indonesia melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam, tidak hanya terhadap minyak bumi tetapi juga sumber daya yang dapat diperbaharui seperti hutan, air, tanah, dan perikanan. Hasilnya, mulai sekitar tahun 1986 perekonomian tumbuh tinggi tidak kurang dari 7% pertahun hingga pertengahan tahun 1997. Di tengah upaya memacu laju perekonomian yang tinggi tersebut, Pemerintah Indonesia, dengan bantuan pemerintah Amerika Serikat melalui USAID, mulai tahun 1990 memberikan perhatian terhadap pengelolaan sumber daya alam.

Pada masa awal berdirinya USAID memiliki bagian program yang dilaksanakan di berbagai negara di dunia. Salah satu program pertamanya USAID adalah *Alliance for progress* yang dibentuk pada tahun 1960.

Dibawah ini program-program USAID di Indonesia:

1. *Basic human services*

Tujuan : meningkatkan kualitas *basic human services.*

Basic human services menyediakan bantuan kepada Indonesia melalui strategi yang mengkombinasikan kesehatan, nutrisi atau makanan dalam manajemen lingkungan serta persediaan air pada level komunitas dan kabupaten

2. *Democracy and governance*

   Tujuan : memperkuat pemerintah lokal, reformasi,dan mengurangi konflik pemerintah Amerika Serikat memberikan bantuan dalam pembangunan pemerintah yang efektif

3. *Earthquake response*

   Tujuan : pemulihan gempa.

   Pemerintah Amerika Serikat berkerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam pemulihan pasca gempa USAID menyediakan 5 juta US$ dalam bantuan darurat

4. *Economic growth*

   Tujuan : meningkatkan kualitas pendidikan dasar

5. *Education*

   Tujuan : memperkuat pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja.

6. *Public-private partnership*

   Tujuan : global *development aliiance* dan partner lainya adalah refleksi dari kotmitmen USAID dalam memperluas upaya-upaya membantu pembangunan di Indonesia.

7. *Tsunami reconstruction*

   Tujuan : pemulihan dan banyuan bagi mereka yang terkena dampak bencana tsunami Desember 2004

   (http://www.usaid.gov/about_usaid/) (16 April 2010)

Melalui Program *Natural Resource Management* (NRM) dikembangkan berbagai strategi pengelolaan terkait dengan sumber daya alam. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, mulai tahun 1997 proyek NRM diarahkan untuk mendukung penguatan pengelolaan sumber daya alam di daerah. Untuk itu, dipilih 3 daerah fokus yaitu Propinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Irian Jaya.

Dalam perkembangannya, program NRM telah memberikan banyak manfaat khususnya bagi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sumber daya alam. Program NRM adalah salah satu dari sedikit proyek berbantuan luar negeri yang sangat responsif dalam mengantisipasi setiap perkembangan dan dinamika yang terjadi selama masa transisi. Beberapa manfaat utama yang sangat dirasakan adalah:

1. Pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilakukan oleh segelintir pihak saja, melainkan memerlukan upaya dan kerjasama berbagai pihak, seperti pemerintah, LSM, perguruan tinggi, pihak swasta, dan masyarakat. Untuk itu diperlukan *political will* dan semangat tinggi dan konsisten untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan lestari.
2. Implementasi desentralisasi di tingkat lokal memerlukan pembagian fungsi pengelolaan yang tegas dan jelas, serta keterbukaan dan komunikasi yang

terus menerus antar *stakeholders*.Untuk itu, perlu peningkatan kapasitas dan penegakan hukum yang konsisten agar prinsip-prinsip *good governance* dapat terlaksana.

3. Upaya penguatan pengelolaan sumber daya alam dapat disinergikan melalui pengembangan *networking* atau jaringan antar pelaku seperti diupayakan oleh program NRM dalam menjaga kondisi taman nasional, hutan lindung dan daerah aliran sungai.
4. Pendidikan tentang lingkungan dan kesadaran pemanfaatan sumber daya alam sebagai *common resources* perlu terus dilakukan. Walaupun kebenaran tradisional telah banyak mengajarkan pentingnya keseimbangan dalam pemanfaatan alam, namun etika dan moral sering kalah oleh kebutuhan manusia yang senantiasa bertambah.
5. Proses-proses kesepakatan tentang pengelolaan sumber daya alam yang dibangun dan dikembangkan mulai dari tingkat masyarakat dapat menghasilkan pengelolaan yang lebih efektif sehingga dapat diperkuat melalui peraturan-peraturan yang mengikat semua pihak.

3.1.2 Organisasi dan Struktur USAID

USAID bermarkas diwilayah Washington D.C dan memiliki kantor-kantor perwakilan dibanyak negara dimanapun program USAID dijalankan, USAID dikepalai oleh seorang Administrator dan wakilnya adalah Deputi administrator keduanya ditujukan oleh prsiden dan disahkan oleh senat.

Organisasi utama USAID disebut biro yang berada di Washington D.C. Setiap biro membawahi tugas stafnya dalam sub divisi besar dari aktifitas USAID. USAID memiliki biro geografis (yang bertanggung jawab terhadap semua aktifitas di Negara tempat program tersebut dijalankan) dan biro fungsional (yang bertugas menjalankan program USAID yang ada diseluruh dunia ataupun yang melintas batas geografis).

Tinjauan umum program dan kegiatan USAID

1. Agrikultur, USAID berkerjasama dengan berbagai pihak dan pembangunan agrikultur untuk meningkatkan produktifitas dari hasil-hasil pertanian, karena pertanian merupakan hal dasar terpenting untuk memenuhi kebutuhn manusia dalam hal mendapatkan makanan.
2. Demokrasi, konsep demokrasi sangat melekat pada identitas nasional Amerika Serikat yang menjelaskan kebijakan luar Negeri Amerika Serikat dalam menegakan dan membentuk pemerintahan yang menuju good governance,
3. Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan,
4. Lingkungan USAID memberikan bantuan manajemen sumber daya alam dan lingkungan,
5. Pendidikan dan pelatihan. USAID memberikan dukungan terhadap program untuk mengembangkan pendidikan dan tempat yang cocok untuk semua khususny para wanita, untuk mendapatkan pendidikan yang layak
6. Kesehatan global. USAID mempunyai program kesehatan yang diwakilkan oleh komite pemerintahan Amerika Serikat untuk mencegah

penderitaan, menjaga hidup, dan membuat masa depan cerah bagi program pembangunan.

(http://www.usaid.gov/our_work/) (16 April 2010)

Sejak tahun 1950 USAID dan badan pendahulunya telah bekerjasama dengan pemerintahan Indonesia dalam membantu pembangunan ekonomi serta bantuan lainya saat ini. Bantuan program USAID kepada Indonesia memfokuskan diri pada 4 area utama yaitu

1. Pertumbuhan ekonomi yang memicu lapangan kerja dan kemiskinan
2. Peningkatan kualitas dan pendidikan dasar
3. Demokrasi efektif dan desentralisasi pemerintah
4. Peningkatan kualitas dari *basic human services* (pelayanan kesehatan air dan nutrisi)

   (http://www.usaid.gov/our_work/) (16 April 2010)

USAID memberikan bantuan dalam bentuk hibah dan kontrak. USAID dalam memberikan bantuanya berkerjasama dengan NGO dan LSM di Indonesia baik NGO luar maupun lokal, selain itu bantuan tersebut diberikan melalui berbagai macam kontraktor dan pemberian bantuan internasional lainya.

USAID menjalankan misinya di Indonesia dengan mematuhi hukum yang berlaku dan aturan-aturan yang berlaku baik implementasi dari semua program dan proyeknya USAID berkonsultasi dengan pemerintah lokal seperti pemerintahan Indonesia.

3.1.3 Kepentingan Amerikat Serikat di Indonesia

Perkembangan hubungan kerjasama antara Pemerintahan Amerika Serikat dengan Pemerintahan Indonesia telah berlangsung lama. Bantuan luar negeri USAID kepada Indonesia telah meluas ke berbagai bidang. Sebelum USAID didirikan, Indonesia dan Amerika serikat telah menandatangani perjanjian kerjasama teknik dan ekonomi pada tanggal 16 oktober 1950. Ini merupakan perjanjian pertama antara Indonesia dengan Amerika.

Bantuan USAID terdiri dari memberikan masukan-masukan teknis kepada Pemerintah Indonesia melalui sejumlah departemen-departemen, bersamaan dengan pemberian dana untuk program-program. USAID ada di Indonesia dengan Tujuan untuk membantu dalam mempercepat transisi demokrasi Indonesia melalui masyarakat sipil. Dalam mendukung proses desentralisasi daerah di Indonesia, program-program USAID antara lain mendukung perbaikan jasa pelayanan local dan perencanaan budgeting pada sector-sektor penanganan dan pengelolaan sumber daya alam.

Kawasan Asia merupakan salah satu wilayah yang telah lama menjadi perhatian utama Amerika Serikat. Hal ini disebabkan karena kepentingan Amerika Serikat di wilyah ini sangat besar baik secara ekonomi politik maupun keamanan. Sejak perang dunia II Amerikat Serikat kekuatan dominan dikawsan Asia Pasifik, kehadiranya saat itu menjadi landasan terciptanya perdamaian dan stabilitas kawasan selama perang dunia.

Kestabilan keamanan dan demokrasi merupakan kampanye global Amerika Serikatdi negara-negara yang sedang berkembang. Selain itu Amerikat

Serikat memiliki kebijakan luar negeri yang mencangkup isu-isu sumber enegri global. Salah satu sumber daya alam di Indonesia yang utama adalah minyak dan gas bumi. Oleh karena itu Amerika Serikat secara tidak langsung harus menjaga hubungan baik dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Oleh sebab itu USAID merupakan salah satu instrumen ekonomi dan sosial pemerintahan Amerika Serikat dalam mengembangkan menjaga kestabilan dan kemakmuran negara berkembang seperti Indonesia. Daerah paling tinggi curah hujanya adalah semenanjung pantai pasifik dan oregon sampai kebagian selatan Alaska.

3.2 Program *Natural Resource Management* (NRM)

3.2.1 Latar Belakang *Natural Resource Management* (NRM)

Amerika Serikat memberikan bantuan kepada Pemerintah Indonesia melalui USAID berupa program pengelolaan sumber daya alam, *Natural Resources Management* (NRM) sejak tahun 1997-2004. Sesuai dengan UU No. 22/1999 tentang pemerintahan daerah, bantuan ini ditujukan untuk memperkuat proses desentralisasi pengelolaan sumber daya alam yang merupakan salah satu faktor penting dalam proses desentralisasi di Indonesia. Program ini juga merupakan bagian dari usaha untuk mengantisipasi memburuknya kondisi sumber daya alam yang telah dieksploitasi tanpa memperhitungkan kapasitas daya dukung dan lingkungan.

Program NRM USAID bekerjasama dengan berbagai instansi Pemerintah Indonesia, dan juga pihak swasta, organisasi non-pemerintah, serta masyarakat untuk memahami peran dan tanggungjawab. Sebagai fasilitator, NRM

memfasilitasi kelompok-kelompok kerja formal dan informal yang terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi secara partisipatif.

Pada tahun 2001, NRM memfokuskan membangun kemitraan yang efektif untuk meningkatkan sumberdaya lokal bagi pengelolaan kawasan konservasi, memperkuat kesadaran dan kebanggaan terhadap pengelolaan konservasi di daerah, membangun kapasitas untuk lebih memfasilitasi pengelolaan kawasan konservasi yang partisipatif melalui mekanisme konsultasi publik untuk menyelesaikan konflik, meningkatkan pendanaan kawasan konservasi dengan memperbaiki alokasi sumberdaya dan menerapkan opsi-opsi keuangan alternatif.

(Sumber: Pembelajaran *Natural Resource Management Program*, Pengalaman dari Proyek Pengelolaan Sumber Daya Alam USAID 1997 — 2004, Jakarta, Indonesia)

Dalam menjalankan program NRM, adapun syarat-syarat yang diharus dimiliki diantaranya :

1. Kondisi lingkungan masih asli
2. Keberadaan satwa/flora yang dilindungi atau langka
3. Ekosistem terpadu, antara lain, dilihat dari asosiasi antarhabitat dalam satu ekosistem.
4. Mewakili ekosistem di sekitarnya.
5. Lokasinya merupakan wilayah kunci dalam kesuburan dan kesinambungan ekosistem, misalnya sebagai tempat peneluran ikan atau terumbu sumber benih (*source reef*).
6. Mempunyai luas yang cukup, minimal 50 hektar atau sekitar 1 kilometer X 1 kilometer.
7. Praktis untuk dikontrol

8. Praktis untuk ditetapkan. Artinya tidak akan menimbulkan konflik kepentingan yang tidak dapat diatasi melalui musyawarah
9. Mempunyai nilai estetika tinggi, tapi ini tidak mutlak.

Proyek NRM berupaya memberdayakan desentralisasi pengelolaan sumber daya alam dengan mendukung tiga tujuan berikut ini:

1. Memperjelas peran dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam dengan menyusun proses perencanaan di daerah yang memberi dampak pada pengelolaan sumber daya alam sehingga menjadi lebih transparan.
2. Membentuk konstituensi yang lebih luas untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sehingga akhinya dapat menyebarluaskan replikasi bentuk dan praktik pengelolaan sumber daya alam yang baik; dan
3. Meningkatkan mata pencaharian para pihak yang sangat bergantung pada sumber daya alam melalui teknologi yang tepat guna dan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pasar.

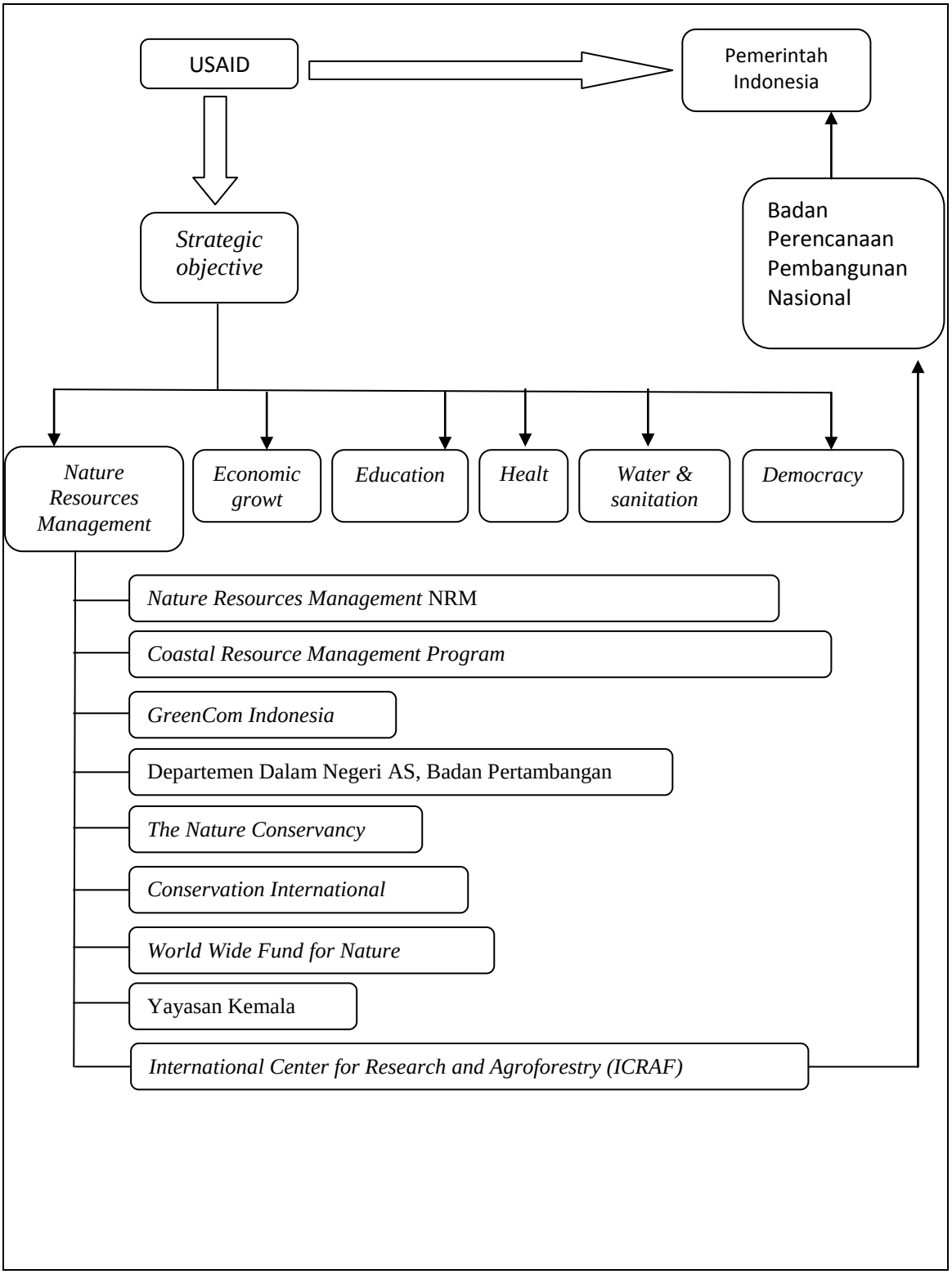
(Sumber: Pembelajaran *Natural Resource Management Program*, Pengalaman dari Proyek Pengelolaan Sumber Daya Alam USAID 1997 — 2004, Jakarta, Indonesia)

Proyek ini digerakkan oleh ketiga kantor penghubung NRM di provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Papua. Proyek Pengelolaan Sumber Daya Alam (NRM) yang didukung USAID telah membina kerjasama dengan para pihak sipil sejak tahun 1997 hingga tahun 2004 guna memberdayakan desentralisasi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Dimulai pada akhir masa Orde Baru

dan terus berlanjut hingga masa reformasi. NRM yang mempunyai perubahan sangat cepat seperti sistem pemerintahan dari yang sangat sentralistis menjadi sistem yang desentralistis dengan otonomi daerah. Keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam terutama yang berhubungan dengan distribusi keuntungan yang diperoleh melalui pemanfaatan yang diizinkan, peraturan dan pembagian pendapatan merupakan isu utama dalam proses desentralisasi. Proyek NRM memiliki kesempatan khusus untuk bisa bekerja sama dengan para pihak pemerintahan maupun masyarakat sipil pada tingkat nasional dan daerah sehingga proses desentralisasi mampu memberi manfaat dan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi yang setara dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Strategi utamanya adalah bekerjasama dengan para pihak lokal dalam mengidentifikasi serta manangani isu-isu sumber daya alam serta lingkungan yang sangat spesifik dan erat hubungannya dengan kawasan lindung, hutan, DAS dan kawasan pesisir. Perencanaan jangka panjang dan proses pengelolaannya memberi peluang guna melakukan pembinaan kapasitas serta memberi pendampingan sehubungan dengan desentralisasi pengelolaan sumber daya alam. Beberapa pelatihan khusus telah diselenggarakan untuk memberdayakan keterampilan para pihak. Bentuk-bentuk serta pendekatan setempat terhadap desentralisasi pengelolaan sumber daya alam kemudian digunakan untuk memberi kontribusi pada wacana kebijakan di tingkat pusat, pada reformasi dan pada replikasi dan adaptasi di lokasi lain di Indonesia. Dengan demikian, desentralisasi pengelolaan bersama yang dilakukan di Taman Nasional Bunaken dapat memberi pengaruh

pada taman nasional lain, Departemen Kehutanan melakukan adaptasi atau reformasi kebijakan nasional. Kerjasama pemerintah Indonesia dan USAID melalui program NRM telah dimulai sejak tahun 1970-an dan masih berlanjut hingga kini. Berikut gambaran secara singkat dimulainya program NRM.



(Sumber: Bunaken Lessons Learned INDONESIAN_2)

Bagan 3.2.1
Kerjasama *Nature Resources Management* (NRM)

Dari bagan diatas dapat dilihat bahwa dalam setiap project kerjasama USAID dengan pemrintah Indonesia, ada yang dinamakan strategic objective. Strategic objective merupakan kesepakatan bersama antara USAID dengan pemerintah Indonesia. Dari strategic objective tersebut dirumuskan beberapa program seperti yang diuraikan pada bagan diatas yaitu program *Nature Resources Management* (NRM), *Economic Growt, Education, Health, Water & Sanitation, Democracy*. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada program *Nature Resources Management* (NRM). Dalam melaksanakan program tersebut, melibatkan beberapa pihak, diantaranya the NRM, *Coastal Resource Management Program*, *GreenCom* Indonesia, Departemen Dalam Negeri AS, Badan Pertambangan, *The Nature Conservancy*, *Conservation International*, *World Wide Fund for Nature*, Yayasan Kemala, *International Center for Research and Agroforestry* (ICRAF).

Tabel 3.2.1
Kronologi kejadian dalam pengembangan manajemen kolaboratif di Taman Nasional Bunaken.

TAHUN	PERKEMBANGAN MANAJEMEN
1970-an	Penyelam lokal bernama Dr. Hanny Batuna, Loky Herlambang, dan Ricky Lasut "menemukan" terumbu karang di Bunaken dan mulai merencanakan pembangunan kawasan wisata.
1980	"Taman Wisata Bahari" Pulau Bunaken secara resmi ditetapkan sebagai Objek Wisata Manado. Wisata selam masih dalam tahap pertumbuhan. 1984 Kawasan taman wisata bahari meluas meliputi daratan daerah Arakan-Wowontulap bagian Selatan.
1986	Pulau Bunaken, Pulau Manado Tua, bagian utara dan selatan daratan ditetapkan sebagai cagar alam oleh Departemen Kehutanan.
1989	Departemen Kehutanan menetapkan kawasan yang meliputi pulau-pulau Bunaken, Manado Tua, Siladen, Mantehage, dan Nain dan bagian utara dan selatan daratan sebagai taman

	nasional.
1991	Bunaken secara resmi dinyatakan sebagai taman nasional laut pertama di Indonesia.
1993	Proyek NRMP - USAID dimulai dengan tujuan melaksanakan rencana pengelolaan 25 tahun Taman Nasional Bunaken.
1996	NRMP selesai dengan hasil Rencana Pengelolaan Taman Nasional Bunaken. Wisata selam sangat digemari dengan jumlah investasi asing yang sangat signifikan.
1997	Unit Pelaksanaan Teknis yang mandiri dibentuk untuk mengelola taman. Departemen Kehutanan menyusun sistem zonasi resmi untuk Bunaken yang berbeda dari yang dipublikasikan di dalam rencana pengelolaan 25 tahun.
1998	Pembentukan Asosiasi pengusaha wisata bahari Sulawesi Utara (NSWA) oleh tujuh operator selam berwawasan lingkungan.
2000	NRM/EPIQ mulai melaksanakan prakarsa desentralisasi pengelolaan bersama (*co-management)* termasuk revisi zonasi partisipatif dan pengembangan kelembagaan pengelolaan multi-stakeholder serta system pungutan masuk. NSWA menandatangani MOU dengan kantor Taman Nasional Bunaken dan polisi air Sulawesi Utara untuk melakukan patroli bersama yang didanai oleh pungutan dari kegiatan selam secarasukarela. Forum Masyarakat Peduli TN Bunaken dibentuk oleh masyarakat setempat pada bulan Oktober. Dewan Multi stakeholder - DPTNB diambil sumpahnya oleh Menteri Kehutanan (SK Gubernur Sulut No.233/2000) dan sistem pungutan masuk dibawah peraturan daerah propinsi pada bulan Desember (PERDA SULUT No. 14/2000). Pulau Bunaken menyelesaikan revisi zonasi pada bulan Desember.
2001	Sistem pungutan masuk diterapkan pada bulan Maret. Staff Sekretariat Eksekutif DPTNB direkrut, sementara sistem patroli bersama masyarakat/jagawana/polisi air dikembangkan.
2002	Pungutan masuk untuk wisatawan mancaNegaramenjadi dua kali lipat dengan dukungan kuat dari komunitas pariwisata (PERDA SULUT No. 9/2002). DPTNB menyelesaikan program kerja tahunan dan anggaran pertama, mempublikasikan evaluasi kegiatan tahun pertama, dan menyusun anggaran dasar. Rencana pengembangan kelembagaan selesai disusun untuk DPTNB. Pulau-pulau Manado Tua dan Mantehage merampungkan revisi zonasi. Ditjen PHKA Departemen Kehutanan mengakui system pengelolaan bersama Taman Nasional Bunaken sebagai model untuk semua taman nasional di Indonesia (Surat Ditjen PHKA 1633/N/KK.6.02)
2003	Direktur Eksekutif pada Sekretariat Eksekutif DPTNB diangkat dan NRM III memulai proses 2 tahun-nya untuk memantapkan kelembagaan DPTNB. Pulau Siladen menyelesaikan revisi

	rencana zonasi. Bagian Selatan Taman Nasional Bunaken (9 desa) siap merampungkan revisi rencana zonasi menjelang akhir tahun. Program Sukarelawan Bunaken dikembangkan.

Sumber : Pengembangan Sistem Pengelolaan Bersama Yang Efektifn Untuk Desentralisasi Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia: 2004

Tabel diatas menunjukkan perkembangan program NRM sejak tahun 1970-an hingga kini. Meski demikian, dalam penelitian ini, peneliti hanya membahas program NRM sejak tahun 2001 hingga tahun 2004. Melalui program NRM, pihak USAID memberikan bantuan berupa bantuan teknis.

3.2.2 Bantuan Teknis

Bantuan teknis yang diberikan oleh USAID melalui program NRM ialah bantuan berupa pelatihan. Pelatihan NRM merupakan pelatihan yang dilakukan baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pelatihan ini merupakan bagian penting dari kegiatan program NRM. NRM juga telah memberikan kegiatan pelatihan kepada para pekerja lapangan, kegiatan NRM di Bunaken ini menjadi salah satu lokasi proyek dalam pengelolaan kawasan pelestarian alam di Taman Nasional Bunken.

1. Pelatihan Fasilitas
2. Pelatihan pengamanan
3. Pelatihan untuk masyarakat, Meliputi Pelatihan
    - Patroli Perairan Laut
    - Patroli Sampah di Taman Nasional Bunaken
    - pelatihan pelestarian trumbu karang proyek rehabilitasi terumbu karang

- pelatihan 22 partisispan di Universitas Aamerika Serikat

Pelatihan yang diberikan melalui program NRM memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sumber daya Mangrove

   Manfaat Mangrove yaitu diberikan Pelatihan kepada masyarakat setempat tentang manfaat mangrove untuk pengobatan.
2. Mengupayakan keterlibatan masyarakat lokal dan LSM dalam pengembangan pariwisata.
3. Menghasilkan kesadaran masyarakat secara material.
4. Pelatihan staf PHPA dalam konservasi laut dan pendekatan partisipatif untuk ekstensi konservasi dan pengembangan masyarakat
5. Penangkapan ikan di dasar laut
6. Teknik Pemantauan batu karang
7. Teknik pengembangan LSM untuk masyarakat.
8. Memberikan pengarahan keamanan di bawah air
9. Arahan mengenai pemeliharaan dan penggunaan dalam menggunakan pelampung
10. Investigasi kegiatan yang menghasilkan pendapatan bagi masyarakat lokal termasuk kebudayaan perairan dan kerajinan.

    (Sumber: Buku Lapangan Taman Nasional Bunaken) (25 April 2010)

3.3 Taman Nasional Bunaken

Propinsi Sulawesi Utara memiliki luas daratan 2.7.966,3 km2, dengan pemanfaatan lahan sebagai berikut : hutan 68,18 %, perkebunan 15,2 %, pertanian lahan kering 7,96 %, sawah 1,68 %, permukiman 1,5. Propinsi Sulawesi Utara terdiri dari Kota Manado, Kota Bitung, Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Sangihe Talaud yang terdiri dari 133 pulau. Kota Manado sebagai ibu kota propinsi. wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kota Manado, mencapai 30.000 – 40.000 orang/tahun.

Penduduk yang tinggal dalam Taman Nasional Bunaken ini terdiri dari tujuh kelompok suku, meliputi Sangir, Bugis, Bajo, Gorontalo, Ternate, Minahasa, dan Bantik. Interaksi antarbudaya relatif tinggi, terlihat dari penggunaan dialek bahasa yang sama, serta kesamaan pemanfaatan potensi sumberdaya laut yang arif, sebagai bukti adanya keselarasan hubungan antar suku dan dengan lingkungan.

Taman Nasional Bunaken telah menjadi primadona pariwisata Sulawesi Utara, hasil survey (NRMP) menunjukkan bahwa 80 % turis yang datang ke Manado untuk melihat keindahan Taman Nasional Bunaken. Selama 20 tahun, Taman Nasional Bunaken terus mengangkat nama Manado dan Sulawesi Utara di mata dunia, Setiap tahun 10.000 - 30.000 wisatawan asing datang khusus mengunjungi Taman Nasional Bunaken, Keberadaan Taman Nasional Bunaken sebagai roda penggerak ekonomi Slawesi Utarat mendukung perkembangan

sarana pariwisata di Sulawesi Utara seperti 19 perusahaan selam, hotel berbintang, restoran dan bandar udara.

Walaupun sangat jelas bahwa Taman Nasional Bunaken penting sekali untuk Sulawesi Utara, namun selama 10 tahun ini kondisi terumbu karang dan ekosistem laut terus menurun, Beberapa turis mengeluh mengenai terumbu karang yang rusak dan pencemaran sampah. Sejarah pembentukan daratan Pulau Sulawesi yang memiliki bentuk khas, masih terus diperdebatkan. Namun dapat dipastikan bahwa Pulau Sulawesi, termasuk kawasan Taman Nasional Bunaken.

Adapun Potensi Taman Nasional Bunaken meliputi:

1. Potensi Geografis

   Salah satu keunggulan Taman Nasional Bunaken adalah letaknya yang sangat berdekatan dengan Manado, ibukota Propinsi Sulawesi Utara. Ini sangat menunjang potensi pariwisata alam Taman Nasional Bunaken. Kondisi ini merupakan karakteristik tersendiri dari kawasan Taman Nasional. Bunaken, yang membutuhkan perhatian khusus dalam hal penataan kawasan, pemantauan, serta pengendalian kegiatan pemanfaatan.

2. Sumber Daya Alam

   Taman Nasional Bunaken memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi sebagai obyek wisata alam maupun obyek penelitian.

3. Terumbu Karang

   Kondisi habitat terumbu karang yang cukup luas (8.000 ha) dan relatif baik. Bahkan Taman Nasional. Bunaken bagian selatan memiliki rataan

terumbu terluas di Sulawesi Utara. Keanekaragaman jenis karang sangat tinggi, mengingat kawasan ini terletak di pusat keanekaragaman hayati laut dan pesisir Indo-Pasifik. Terumbu karang terbentuk dari komunitas yang seimbang dari berbagai tumbuhan dan hewan laut, baik yang mati mau pun yang hidup. Struktur fisik terumbu terutama dibangun oleh zat kapur dari rangka karang-karang keras (karang batu). Namun demikian, kerang dan siput, foramida, dan bagian tubuh spons yang keras juga ikut membentuk struktur terumbu. Ribuan jenis ikan, penyu, ular laut, seperti karang, kepiting, udang, bintang laut, teripang, keong, kima, cacing, dan spons hanyalah sebagian kecil dari hewan-hewan yang hidup di terumbu. Alga merupakan tumbuhan utama yang hidup di terumbu karang. Semua organisma yang ada di terumbu karang saling bergantung satu sama lain agar bisa bertahan hidup. Fungsi terumbu karang Untuk organisma laut, terumbu karang menyediakan habitat yang stabil sebagai tempat hidup. Untuk manusia, fungsi utama terumbu karang adalah sebagai sumber makanan yang penting, demikian juga sebagai sumber obat-obatan, dan sumber pendapatan. Terumbu karang juga memiliki fungsi penting sebagai pelindung garis pantai, dengan fungsi pemecah dan penghalang ombak-ombak besar yang bisa mengikis pantai. Fungsi lainnya adalah sebagai tempat wisata karena memiliki pemandangan yang indah. Jenis terumbu karang Jenis terumbu utama Taman Nasional Bunaken adalah terumbu tepi. Terumbu tepi merupakan terumbu yang tumbuh di sepanjang garis pantai atau di sekeliling pulau. Juga terdapat terumbu mengelompok di

wilayah Arakan-Wawontulap, dan pada kolam (laguna kecil) di Pulau Nain. Patch reef membentuk koloni (kelompok) sendiri pada perairan dangkal. Kemudian, sebagian terumbu di Pulau Mantehage merupakan terumbu penghalang.

2. Mangrove

Hutan bakau di Taman Nasional. Bunaken sangat luas (2.693 ha) terutama di bagian selatan, serta bagian utara terutama di Pulau Mantehage. Luas total hutan bakau di Taman Nasional Bunaken adalah 20% dari luas total hutan bakau di Sulawesi Utara. Taman Nasional Bunaken memiliki komunitas mangrove yang termasuk paling tua di Asia Tenggara. Kita masih bisa menemukan pohon-pohon bakau berukuran besar (diameter 1,5 m) di wilayah bagian selatan Taman Nasional Bunaken yang sudah sulit ditemukan di tempat lain. Di samping itu keragaman jenis mangrove sangat tinggi, ada 38 spesies mangrove yang ditemukan di Taman Nasional Bunaken, bahkan terdapat jenis yang sebenarnya tidak termasuk dalam wilayah biogeografinya. Mangrove yang luas terdapat di Pulau Mantehage, pesisir Arakan-Wawontulap, dan sebagian daerah Molas-Wori. Pulau Bunaken juga memiliki sedikit mangrove. Pohon mangrove setinggi 30 meter yang berumur ratusan tahun dapat ditemukan di daerah Arakan-Wawontulap. Sedang hutan pantai dapat ditemukan di daerah berpasir landai, atau di belakang hutan mangrove di hampir semua pulau dan daerah pesisir di Taman Nasional Bunaken. Terdapat 29 species mangrove yang sudah diidentifikasi di Taman Nasional Bunaken.

3. Flora dan Fauna Terestrial

Di pulau Manado Tua, masih dapat di menemukan hutan asli dengan berbagai jenis pohon. Satwa khas endemik Sulawesi terdapat di hutan ini seperti monyet hitam (yaki), dan kuskus. Di pulau Mantehage dapat kita temukan rusa dan tarsius.

Dalam Taman Nasional Bunaken ada beberapa hindaran untuk tidak merusak terumbu karang yang telah ada :

- Hindari menginjak, berjalan atau memegang karang. Karang kelihatan seperti batu, tetapi sebenarnya merupakan hewan yang sangat rapuh, mudah patah. Bahkan sentuhan yang pelan saja bisa membunuh polip karang.
- Hati-hatilah saat berenang dengan fins di dekat karang, karena kayuhan fins bisa mengenai dan mematahkan karang.
- Juga hindari mengayuh fins terlalu denkat dengan pasir, karena bisa menyebabkan pasir/ sedimen dasar terangkat sehingga mengotori dan mematikan polip karang.
- Latihlah daya apung anda sebelum menyelam di Taman Nasional Bunaken. Terlalu banyak penyelam dengan daya apung yang kurang baik bisa merusak terumbu. Pastikan perahu selam anda tidak membuang jangkar pada daerah terumbu, lebih baik menggunakan bui tambatan perahu.

Adapula aturan-aturan untuk tidak meninggalkan sampah di Taman Nasional Bunaken agar terjaka kelestarianya :

- Janganlah membuang sampah ke laut atau pantai. Kantong plastik sangat berbahaya bai penyu, serta terumbu karang. Jika tidak menemukan tong sampah, harap membawa kembali sampah anda keluar dari Taman Nasional Bunaken.

  (Sumber: Buku Lapangan Taman Nasional Bunaken) (25 April 2010)

Tumbuhan paling umum ditemukan di pantai Taman Nasional Bunaken adalah mangrove, yang dapat mentolerir air asin dan tanah bergaram. Jenis lain adalah jenis Bitung (*Barringtonia asiatica*), yaitu pohon berdaun lebar dengan bunga putih berbau harum, juga pandan *(Pandanas sp.*) serta pohon ketapang yang banyak ditanam penduduk sebagai pohon naungan. Selain itu juga ditemukan beberapa jenis rumputan dan tanaman menjalar.

Terdapat dua desa di Pulau Bunaken, yaitu Desa Bunaken (termasuk perkampungan di Pulau Siladen) dan Desa Alung Banua. Desa Bunaken terletak di bagian Timur, dan Desa Alungbanua di bagian Barat. Kedua desa ini masuk dalam wilayah Kecamatan Molas, Kotamadya Manado. Di dalam Taman Nasional Bunaken ada yang disebut dengan Dewan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken (DPTNB). Maksud dan tujuan Dewan PengelolaanTaman Nasional Bunaken adalah :

1. Membantu pelestarian dan pembangunan Taman Nasional Bunaken
2. Merupakan wadah pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Utara, kota Manado, Kabupaten Minahasa, Balai Taman Nasional Bunaken, instansi terkait, LSM lokal, Sektor Bisnis dan akademisi untuk bekerjasama dalam rangka memperkuat pengelolaan Taman Nasional Bunaken sehingga dapat

memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat secara berlanjut baik masa sekarang maupun bagi generasi yang akan datang

3. Memberi masukan kepada Balai Taman Nasional Bunaken, atas dasar aspirasi para pihak yang menjadi anggota Dewan, untuk memperkuat pengelolaan Taman Nasional Bunaken.

Dalam Dewan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken selain mempunya maksud dan tujuan Dewan Taman Nasional BUnaken juga memiliki Struktur organisasi, dimana terdapat.

1. Ketua :Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Utara
2. Wakil Ketua:Wakil Pengusaha Wisata Bahari
3. Sekretaris:Asisten Administrasi Pembangunan SekdaPropinsi Sulawesi Utara.

Dimana para anggota-anggota dari Dewan Penggelolaan Taman Nasional Bunaken terdapat beberapa Wakil-wakil dari golongan masyarakt, universitas-universitas, wakil pengusaha wisata bahri, Pemerintahan propinsi Sumatra Utara, Pemerintahan kota Menado, Pemerintahan Kota Minahasa dan wakil-wakil LSM yang berkegiatan di kawasan dan balai Taman Nasional Bunaken. Adapun beberapa fungsi di dalam Dewan Penggelolaan Taman Nasional Bunaken itu sendiri adalah:

1. Menyusun rencana kerja tahunan, dan lima tahun program Pengelolaan Taman Nasional Bunaken.
2. Menyusun rencana program pengelolaan berdasarkan prioritas kebutuhan pengelolaan Taman Nasional Bunaken.

3. Mengarahkan kebijakan dan strategi tahunan dari Pemerintah Daerah.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program tahunan dan lima tahun Dewan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken.